KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN

PUSAT PELATIHAN DAM KESEHATAN

TAHUN 2017

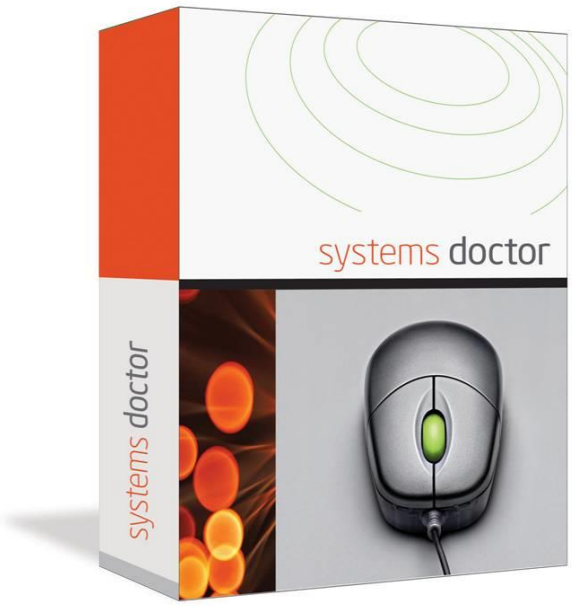

PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, karena laporan tahunan kegiatan unit eselon 2 Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2017 ini telah selesai disusun sebagai pertenggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2017.

Dengan tersusunanya laporan tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pusat SDM Kesehatan pada tahun 2017 dan selanjutnya laporan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian terget indikator, penyerapan/ realisasi dana dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, 31 Januari 2018

Kepala Puslat SDM Kesehatan,

dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS
NIP 196007311989031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I ANALISA SITUASI AWAL TAHUN..... 1

A. Bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan..... 3

B. Bidang pengembangan pelatihan 3

C. Bidang pengendali mutu pelatihan..... 4

D. Sub Bagian Tata Usaha 4

E. Keompok jabatan Fungsional..... 5

BAB II TUJUAN DAN SASARAN KERJA..... 10

A. Dasar hukum 10

B. Tujuan, sasaran dan indikator 11

BAB III STRATEGI PELAKSANAAN..... 13

A. Sasaran strategis..... 13

B. Hambatan dalam pelaksanaan Strategi..... 13

C. Terobosan/ Inovasi yang dilakukan..... 14

D. Upaya Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Satker Wilayah Bebas Korupsi (WBK)..... 15

BAB IV HASIL KERJA..... 17

A. Pencapaian tujuan dan sasaran..... 17

B. Pencapaian Kinerja..... 18

C. Realisasi Anggaran..... 23

BAB V PENTUP..... 28

LAMPIRAN

BAB I
ANALISA SITUASI AWAL TAHUN

Masalah dan hambatan yang terjadi pada tahun 2016 menjadi dasar upaya perbaikan pelaksanaan program pada tahun 2017.

I. Hambatan Tahun 2016

Hambatan yang terjadi selama tahun 2016 sebagai berikut :

1) Perubahan nomenklatur dan perubahan tugas fungsi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
2) Perubahan kebijakan terkait pelatihan dimana Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mendukung program prioritas nasional yaitu Pelatihan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) sehingga terjadi revisi beberapa kali
3) Pelaksanaan kegiatan belum mengacu pada Rencana Penarikan Dana (RPD) serta Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) sehingga pelaksanaan kegiatan belum optimal
4) Revisi DIPA terkait kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp. 19.231.248.000 (37,48%) dari anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebesar Rp. 51.370.450.000
5) Belum terbitnya revisi PP 21 tahun 2013 terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga tidak ada penerimaan PNBP selama tahun 2016 dan tidak terealisasinya kegiatan PNBP sebesar Rp. 554.542.000

II. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, struktur organisasi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan adalah sebagai berikut :

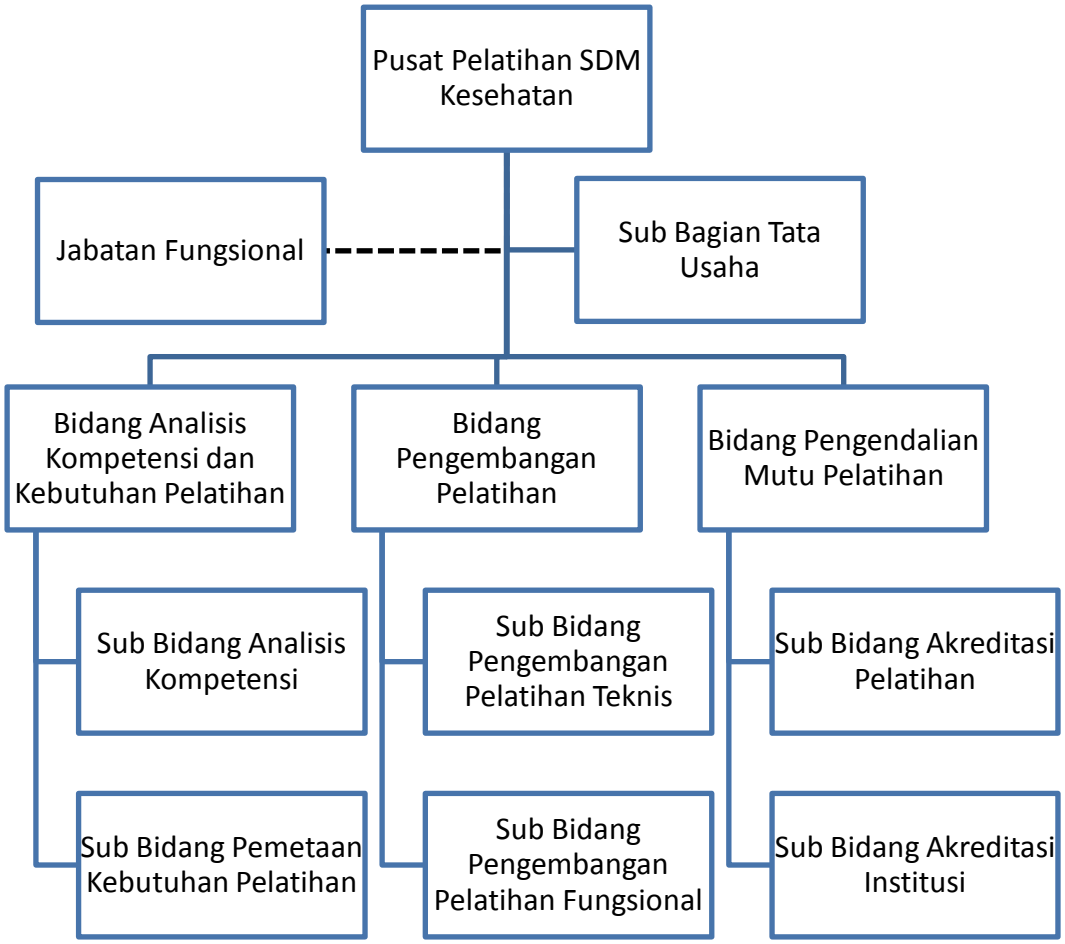

Gambar 1 : Struktur Organisasi Puslat SDM Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kesehatan maka Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut maka Pusat Pelatihan SDM kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;

- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- pelaksanaan administrasi Pusat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan terdiri dari 3 bidang dan 1 sub bagian yaitu:

A. Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan SDM kesehatan.

   Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

   a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan sumber day amanusia kesehatan
   b) Penyiapan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia kesehatan

   Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan terdiri dari :

   a) Sub Bidang Analisis Kompetensi, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan
   b) Sub BIdang Pemetaan Kebutuhan Pelatihan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemetaan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan lainnya termasuk diklat kepemimpinan dan prajabatan

B. Bidang Pengembangan Pelatihan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan SDM Kesehatan.

   Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

   a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pelatihan teknis dan fungsional sumber daya manusia kesehatan
   b) Penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan teknis dan fungsional sumber daya manusia kesehatan

Bidang Pengembangan Pelatihan terdiri dari :

a) Sub Bidang Pengembangan Pelatihan Teknis, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan teknis sumber day amanusia kesehatan termasuk manajemen, upaya, teknis penunjang fungsional dan profesi
b) Sub Bidang Pengembangan Pelatihan Fungsional, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan jabatan fungsional tertentu dan umum

C. Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pelatihan.

Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang akreditasi pelatihan dan institusi pelatihan
b) Penyiapan pelaksanaan di bidang akreditasi pelatihan dan institusi pelatihan

Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan terdiri dari :

a) Sub Bidang Akreditasi Pelatihan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang akreditasi pelatihan sumber daya manusia kesehatan
b) Sub BIdang Akreditasi Institusi Pelatihan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang akreditasi institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan

D. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik Negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat

E. Kelompok Jabatan Fungsional

III. Sumber Daya

Sumber daya pada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan per Desember 2017, sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sejumlah 93 orang yang diuraikan sebagai berikut :

a. Menurut jenis Kelamin

- Laki-Laki : 44 orang
- Perempuan : 49 orang

Grafik 1

Jumlah SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Jenis Kelamin

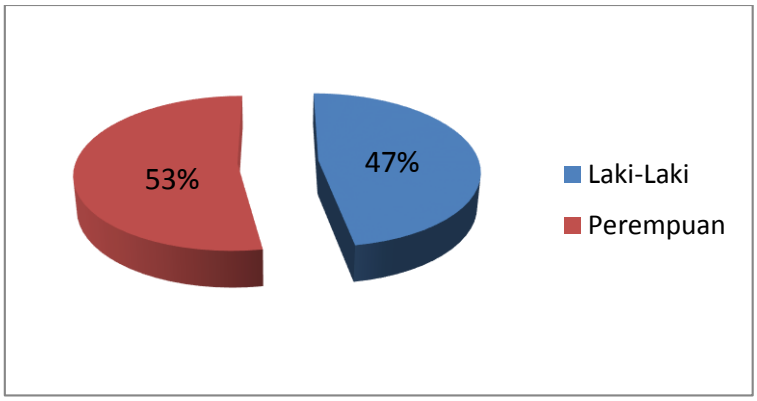

b. Menurut Golongan Ruang/ Kepangkatan

- Golongan IV : 20 orang
- Golongan III : 58 orang
- Golongan II : 14 orang
- Golongan I : 1 orang

Grafik 2

Jumlah SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Golongan Ruang/ Kepangkatan

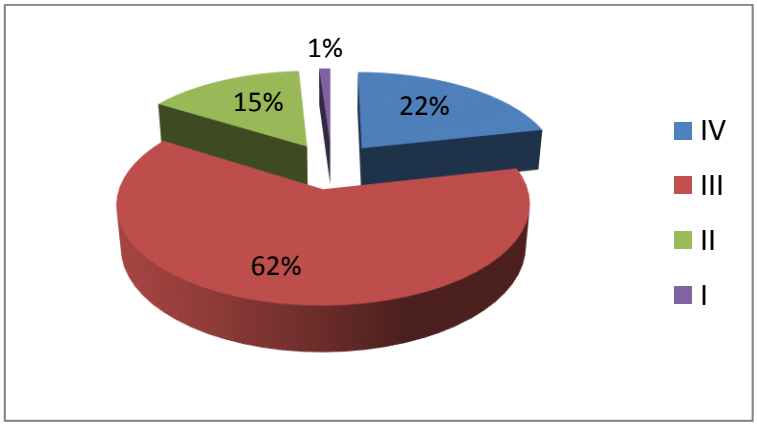

c. Menurut Pendidikan

- S3 : 3 orang
- S2 : 28 orang
- S1 : 29 orang
- DIII : 2 orang
- SLTA : 31 orang
- SLTP : 1 oarng

Grafik 3

Jumlah SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Pendidikan

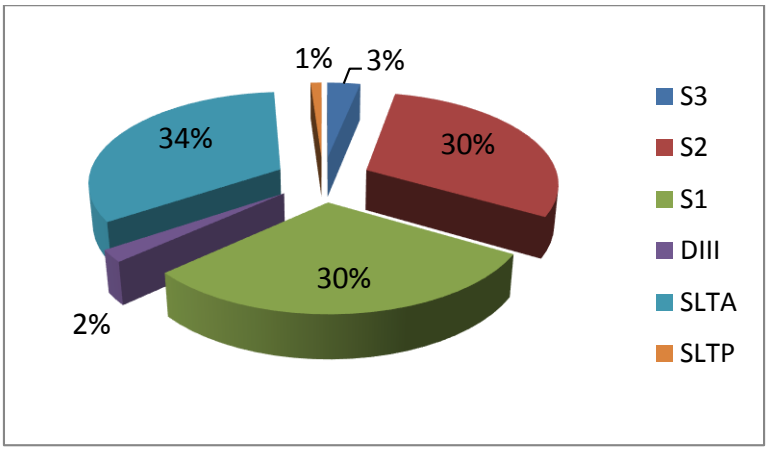

d. Menurut jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH	%
1	JABATAN STRUKTURAL		
	a. Eselon II	1	1.08%
	b. Eselon III	3	3.23%
	c. Eselon IV	6	6.45%
	Sub Total	***10***	***10.75%***
2	JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA		
	a. Widyaiswara Utama	3	3.23%
	b. Widyaiswara	3	3.23%
	Sub Total	***6***	***6.45%***
3	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)		
	a. Kesehatan		
	b. Non Kesehatan		
	1) Arsiparis Penyelia	1	1.08%
	Sub Total	***1***	***1.08%***
4	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)		
	a. Perencana	2	2.15%
	b. Pengevaluasi	1	1.08%
	c. Analis Data	32	34.41%

	d. Bendahara	2	2.15%
	e. Penata Laporan Keuangan	1	1.08%
	f. Verifikator Keuangan	3	3.23%
	g. Pengelola BMN	2	2.15%
	h. Pranata Komputer	1	1.08%
	i. Pengolah Data	3	3.23%
	j. Analis Kepegawaian	3	3.23%
	k. Analis Kepegawaian Pemula	1	1.08%
	l. Agendaris	1	1.08%
	m. Sekretaris	1	1.08%
	n. Pengadministrasi Umum	19	20.43%
	o. Arsiparis Pemula	4	4.30%
	Sub Total	***76***	***81.72%***
	TOTAL KESELURUHAN	***93***	

Grafik 4

Jumlah SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Jabatan

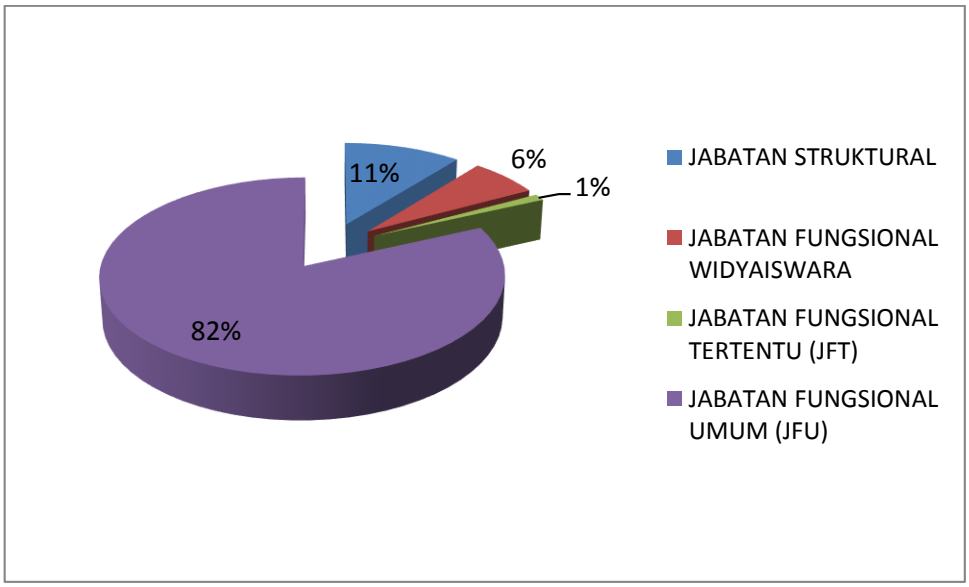

Sumber daya manusia per Desember tahun 2017 pada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sejumlah 93 orang terdiri dari 10 orang struktural, 6 orang jabatan fungsional widyaiswara yang terdiri dari 3 orang widyaiswara utama dan 3 oang widyaiswara, 1 orang pada jabatan fungsional tertentu non kesehatan yaitu arsiparis penyelia, serta 76 orang dalam jabatan fungsional umum yang terdiri dari 15 jenis JFU.

e. Menurut Usia

- Usia 60 – 65
- Usia 50 – 59
- Usia 40 – 49
- Usia 30 – 39
- Usia 20 – 29

Grafik 5

Jumlah SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Usia

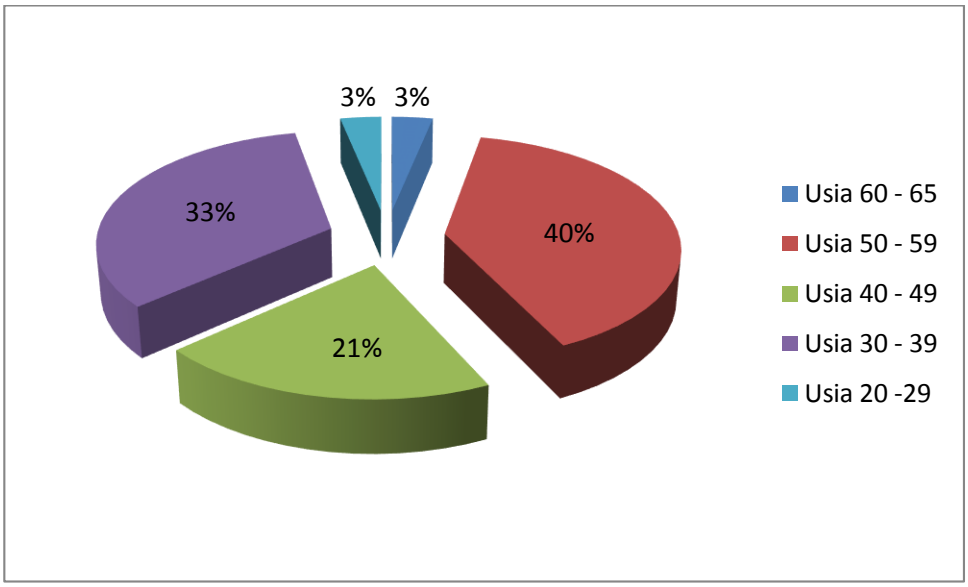

Dari gambaran sumber daya manusia yang ada di Pusat pelatihan SDM Kesehatan disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada merupakan SDM yang produktif dalam mendukung pencapaian kinerja dan anggaran Puslat SDM Kesehatan.

f. Menurut pegawai yang diangkat, pegawai yang pensiun dan pegawai non PNS :

- Pegawai yang baru diangkat : 0 orang
- Pegawai yang pensiun : 3 orang
- Pegawai Non PNS :

2. Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan revisi DIPA terakhir tahun 2017 maka alokasi belanja Program Pelatihan SDM Kesehatan tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 1

Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat pelatihan SDM Kesehatan

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
2017	Rp. 29.382.345.000	Rp. 25.712.762.481	87.51

3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Pusat Pelatihan SDM Kesehatan berada di Gedung badan Pengembanagn dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan lantai 7 dan beralamat di Jl. Hang Jebat III Blok F.3 kebayoran baru Jakarta Selatan. Pengelolaan gedung merupakan wewenang Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.

Sarana dan Prasarana yang ada baik peralatan bergerak maupun tidak bergerak yaitu peralatan dan mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 berada dalam kondisi masih baik berjumlah 480 unit dengan nilai Rp. 3.481.882.882,- sedangkan aset tetap yang tidak digunakan berjumlah 74 unit senilai rp. 10.502.800,-. Aset tak berwujud berupa software senilai Rp. 509.245.000,-

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN KERJA

A. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional,
b. Peraturan Pemerintah RI Nmor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005—2025
d. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota
f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional
h. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
i. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kesehatan
l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/ Menkes SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025
m. KeputusanMenteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor Hk.02.02/MENKES/52/2015 TentangRencana StrategisKementerian KesehatanTahun 2015-2019
n. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.0.02/MENKES/278/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2015-2019
o. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang Indikator KInerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator

1. Tujuan

   Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mendukung upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dengan fokus pada pelatihan sumber daya manusia kesehatan serta merancang dan mengembangkan program pelatihan yang stratejik sesuai perubahan.

   Sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM Kesehatan dilaksanakan melalui pengembangan pelatihan yang inovatif serta menyiapkan standar kompetensi dan kurikulum modul yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan yang lebih bermutu dan berkualitas.

2. Sasaran

   Sasaran Strategis Puslat SDM Kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019 dalam rangka meningkatkan kompetensi, mutu serta standar pelatihan sebagai upaya peningkatan kompetensi SDM kesehatan adalah :

   a. Tersedianya Peta dan Rencana Pelaksanaan Pelatihan SDM Kesehatan dalam setiap tahapan Rencana Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan berdasarkan kajian kebutuhan pelatihan.
   b. Terselenggaranya pelatihan SDM kesehatan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pelatihan SDM Kesehatan dalam setiap tahapan Rencana Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan.
   c. Terbinanya semua institusi pelatihan, penyelenggara diklat lainnya, tenaga pelatih, serta tenaga pelatihan secara periodik.
   d. Tersedianya sumber daya pelatihan SDM kesehatan, baik pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang sesuai standar, teralokasi dengan benar, dan dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel.
   e. Berkembangnya pelatihan SDM kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
   f. Menguatnya jejaring antar berbagai pemangku kepentingan baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelatihan SDM kesehatan.
   g. Termanfaatkannya instalasi kajian kompetensi SDM kesehatan dalam pengembangan pelatihan yang berdampak terhadap karier SDM kesehatan.

3. Indikator

Indikator Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2017 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan Teknis dan Fungsional terakreditasi sebanyak 25.000 orang. Indikator ini dicapai dengan pelaksanaan pelatihan yang dibagi kepada Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK), Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) dan dana dekonsentrasi yang dilaksanakan di 34 provinsi serta melalui pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh non APBN (swasta dan rumah sakit).

Tabel 2

Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tahun : 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelatihan SDM Kesehatan	1 Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan Teknis dan Fungsional terakreditasi	25.000 orang
		2 Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih Substansi Promosi Kesehatan	3.480 orang
		3 Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan	290 orang

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 40.549.442.000,-
(Empat puluh milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)

BAB III
STRATEGI PELAKSANAAN

A. Sasaran Startegis

Sasaran Strategis Puslat SDM Kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019 sesuai Rencana Aksi Kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, mutu serta standar pelatihan sebagai upaya peningkatan kompetensi SDM kesehatan adalah :

1. TersedianyaPeta dan Rencana Pelaksanaan Pelatihan SDM Kesehatan dalam setiap tahapan Rencana Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan berdasarkan kajian kebutuhan pelatihan.
2. Terselenggaranya pelatihan SDM kesehatan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pelatihan SDM Kesehatan dalam setiap tahapan Rencana Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan.
3. Terbinanya semua institusi pelatihan, penyelenggara diklat lainnya, tenaga pelatih, serta tenaga pelatihan secara periodik.
4. Tersedianya sumber daya pelatihan SDM kesehatan, baik pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang sesuai standar, teralokasi dengan benar, dan dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel.
5. Berkembangnya pelatihan SDM kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Menguatnya jejaring antar berbagai pemangku kepentingan baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelatihan SDM kesehatan.
7. Termanfaatkannya instalasi kajian kompetensi SDM kesehatan dalam pengembangan pelatihan yang berdampak terhadap karier SDM kesehatan

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi

Hambatan yang dihadapi selama tahun 2017 dalam pelaksanaan strategi adalah :

1) Kebijakan pelatihan dalam upaya mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga mengakibatkan revisi pada anggaran dan jenis pelatihan
2) Kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 11.167.097.000 sehingga anggaran Puslat SDM Kesehatan dari Rp. 40.549.442.000,- menjadi Rp. 29,382,345,000 mengakibatkan revisi anggaran dan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan
3) Pelaksanaan kegiatan mengalami reschedule dan tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD)

4) Belum terbitnya revisi PP 21 tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga selama tahun 2017 tdak ada penerimaan dan mengakibatkan tidak terealisasinya kegiatan PNBP sebesar Rp. 554.541.000,- atau sebesar 1,89%

C. Terobosan/ Inovasi yang Dilakukan

1) Sistem Informasi Kebutuhan Pelatihan (Sibulat)

   Merupakan aplikasi yang menggambarkan peta kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk memfasilitasi satker menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawainya. Aplikasi ini dapat diakses oleh masing-masing pegawai sehingga mempermudah pengumpulan data

2) Sistem Informasi Realisasi Anggaran 2076 (SIRA 2076)

   Merupakan aplikasi yang menyajikan informasi realisasi anggaran 2076 (program pelatihan) secara cepat dan akurat. Aplikasi ini juga sebagai upaya pemantauan rencana kegiatan dan realisasi anggaran serta identifikasi masalah

3) Standar Kompetensi Jabatan yang disusun untuk menentukan kompetensi apa saja yang dibutuhkan dalam jabatan tertentu

4) Pengelolaan dana dekonsentrasi di 34 Provinsi sebesar Rp. .....untuk melaksanakan pelatihan PIS-PK sebagai prioritas nasional yaitu pelatihan keluarga sehat dan pelatihan manajemen puskesmas. Selain itu terdapat pelatihan komunikasi perubahan perilaku (KPP) dan pelatihan tim penilai jabatan fungsional kesehatan.

5) Menyusun 12 (dua belas) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai upaya menstandarkan kegiatan bidang kesehatan

6) Menyusun kurikulum dan modul sebanyak 9 kurikulum dan 6 modul untuk pelatihan

7) Mengakreditasi institusi sebagai unit pelaksana diklat sebanyak 18 (delapan belas) institusi yang terdiri dari bapelkes daerah, rumah sakit dan swasta

8) Mengakreditasi pelatihan sebanyak 190 yang terdiri dari pelatihan teknis dan pelatihan manajemen kesehatan

9) Menerbitkan 644 rekomendasi pelaksanaan pelatihan yang diadakan oleh unit pelaksana diklat dari unit program, rumah sakit dan swasta

10) Assessmen yang telah dilaksanakan yaitu untuk peserta Diklat PIM II, III dan IV serta untuk latsar CPNS. Selain itu juga telah dilaksanakan Fit and proper Test Untuk Pejabat Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan

11) Melakukan monitoring dan evaluasi sebagai upaya memastikan bahwa penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan mutu dan strandar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan komponen akreditasi pelatihan yang diselenggarakan oleh unit program, swasta, rumah sakit ataupun provinsi dengan dana dekonsentrasi
12) Melakukan evaluasi pasca pelatihan PIS-PK sebagai program prioritas Kementerian Kesehatan di 15 kabupaten di 5 provinsi untuk mengetahui sejauh mana manfaat pelatihan yang telah diselenggarakan.
13) Menyusun 4 standard kompetensi yaitu standard kompetensi kerja khusus APDN, standard kompetensi pengelola rumah sakit, standard kompetensi pejabat tinggi, administrator dan pengawai serta standard kompetensi manajerial

D. Upaya Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Satker Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Pusat Pelatihan SDM Kesehatan berperan aktif dalam upaya mencapai hasil penilaian keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Reformasi Birokrasi sebagai salah satu wujud pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) antara lain :

1) Menerbitkan Surat Keputusan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
2) Membuat usulan satker Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
3) Melaksanakan sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi di lingkungan Puslat SDM Kesehatan
4) Melaksanakan penandatanganan Komitmen Anti Korupsi dan Pakta Integritas bagi seluruh pegawai Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
5) Melaksanakan review dengan Biro Perencanaan dan Anggaran serta Inspektorat Jendera dalam proses perencanaan sehingga perencanaan kegiatan dapat terpantau dengan baik
6) Melaksanakan monitoring terhadap kegiatan kontraktual melalui Kartu Pengawasan (Karwas) yang harus diinput sebelum diajukan ke KPPN Jakarta VII serta wajib mendapatkan persetujuan KPPN Jakarta VII
7) Mengatur pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan agar dapat terlaksana secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien
8) Monitoring penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan oleh pimpinan secara berkala setiap bulan dan triwulan
9) Melakukan rekonsiliasi keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) secara berkala dengan KPPN Jakarta VII setiap bulan

10) Melakukan pertemuan berkala untuk membahas capaian dan realisasi anggaran serta membahas permasalahan dan kendala yang dihadapi untuk mencari solusi permasalahan yang terbaik
11) Melakukan penyempurnaan sasaran Kinerja Pegawai (SKP)/ Kamus Kompetensi dalam upaya reformasi birokrasi
12) Melakukan review SOP di lingkungan Puslat SDM Kesehatan
13) Melaksanakan fit and proper test bagi pejabat tinggi pratama dan pejabat tinggi madya
14) Melaksanakan assessment bagi peserta Diklat PIM II, III dan IV serta latsar CPNS
15) Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan yaitu pengajuan akreditasi atau sertifikasi pelatihan sebagai upaya pencegahan gratifikasi atau pungutan liar

BAB IV
HASIL KERJA

A. Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan berdasarkan Rencana kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana kerja (Renja) tahun 2017, maka telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pelatihan bidang kesehatan dan menghasilkan capaian indikator kinerja yaitu Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan Teknis dan Fungsional terakreditasi sebanyak 43.691 orang atau 174,76 % dari target 25.000 orang.

Pencapaian sasaran kinerja ini didukung oleh kegiatan pelatihan SDM kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Masukan (input)

   Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka perlu adanya masukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sarana prasarana dan didukung oleh teknologi yang terus berkembang serta anggaran yang tercantum dalam DIPA tahun 2017 sebesar Rp. 29,382,345,000. Selain itu juga didapat dari capaian program pelatihan (2076) yang berada di BBPK dan Bapelkes UPT Pusat, dana dekonsentrasi yang terdapat di provinsi dan penyelenggaran pelatihan yang dilaksanakan oleh unit program, swasta dan rumah sakit.

2. Luaran (output)

   Luaran (output) yang dicapai oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

   a. Pelatihan Teknis dan Fungsional Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebanyak 1 dokumen
   b. Layanan Internal sebanyak 7 dokumen
   c. Layanan Perkantoran sebanyak 12 bulan

3. Manfaat (benefit)

   Manfaat yang dihasilkan bukan hanya untuk Pusat pelatihan SDM Kesehatan saja, tetapi juga untuk BBPK dan Bapelkes UPT Pusat, Bapelkes seluruh Indonesia, unit program Kemenkes, rumah sakitr dan pihak swasta sebagai penyelenggara pelatihan.

Manfaat yang diterima antara lain :

a. Tersedianya kurikulum dan modul pelatihan bagi pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan
b. Tersedianya NSPK bidang pelatihan kesehatan dalam rangka mendukung penyelenggaran pelatihan yang berstandar dan bermutu
c. Meningkatnya kualitas pelatihan yang dilaksanakan baik oleh BBPK dan Bapelkes UPT Pusat, bapelkes seluruh Indonesia, unit program Kemenkes, rumah sakit ataupun pihak swasta sebagai hasil monitoring dan evaluasi pelatihan
d. Peserta mendapatkan pelatihan yang berstandar dan bermutu sesuai dengan standard akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan

B. Pencapaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2017 maka sasaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan adalah meningkatnya pelatihan SDM Kesehatan dengan indikator kinerja Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi. Pengukuran kinerja Pusat pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Pengukuran Kinerja Puslat SDM Kesehatan Tahun 2017

PENGUKURAN KINERJA PUSLAT SDM KESEHATAN TAHUN 2017					
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Presentase Pencapaian Tingkat Capaian (Target)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pelatihan SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi	orang	25.000	43.691	174,76 %
Jumlah Anggaran kegiatan Tahun 2017			Rp. 29.382.345.000,-		
Jumlah realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017			Rp. 25.712.762.481,- (87,51%)		

2. Capaian menurut indikator output tahun 2017
   a. Pelatihan Teknis Dan Fungsional Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan
      1) Laporan Pelaksanaan TNA
      2) Laporan Analisis Kompetensi
      3) Laporan Pemetaan Kebutuhan Pelatihan
      4) Penyusunan Bahan Ajar, Kurikulum, Modul, dan Standarisasi Kurikulum (15 dokumen)
      5) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur Pedoman, Kriteria Pelatihan (12 dokumen)
      6) Akreditasi Pelatihan (190 akreditasi)
      7) Akreditas Institusi Pelatihan (18 institusi)
      8) Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan (1 dokumen)

   b. Layanan Internal
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran (2 dokumen)
      2) Laporan Kepegawaian, Umum dan Pengadaan
      3) Laporan Keuangan dan BMN (4 dokumen)
      4) Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (2 dokumen)
      5) Laporan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program
      6) Sistem Informasi Pelatihan

   c. Layanan Perkantoran
      1) Operasional dan Pemeliharaan Kantor, berlangsung selama 12 bulan

3. Capaian program 2076 pada BBPK, Bapelkes dan Dana Dekonsentrasi

   Hasil capaian program pelatihan (2076) adalah sebagai berikut :

   a. BBPK Jakarta

ALOKASI		REALISASI		PERSENTASE	
Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)
27,828,089,000	4,078	25,267,640,750	4,410	90.80%	108.14%

b. BBPK Ciloto

ALOKASI		REALISASI		PERSENTASE	
Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)
64,515,534,000	5,267	56,267,660,849	5,499	87.22%	104.40%

c. BBPK Makassar

ALOKASI		REALISASI		PERSENTASE	
Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)
21,992,037,000	2,994	19,666,373,977	4,246	89.42%	141.82%

d. Bapelkes Cikarang

ALOKASI		REALISASI		PERSENTASE	
Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)
7,891,321,000	979	7,723,246,750	998	97.87%	101.94%

e. Bapelkes Semarang

ALOKASI		REALISASI		PERSENTASE	
Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)
8,862,972,000	1,877	7,992,716,004	1,826	90.18%	97.28%

f. Bapelkes Batam

ALOKASI		REALISASI		PERSENTASE	
Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)	Anggaran	Fisik (orang)
18,660,807,000	2,682	16,430,241,899	2,690	88.05%	100.30%

g. Dana Dekonsentrasi

No	Provinsi	Target	Capaian	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DKI Jakarta	930	596	64.09%	3,610,870,000	2,128,511,700	58.95%
2	Jawa Barat	1,317	1,287	97.72%	4,640,288,000	4,261,188,000	91.83%
3	Jawa Tengah	1,260	1,317	104.52%	4,725,051,000	4,097,085,240	86.71%
4	DI Yogyakarta	305	302	99.02%	1,281,290,000	1,112,801,700	86.85%
5	Jawa Timur	1,350	1,322	97.93%	5,459,350,000	4,664,265,000	85.44%
6	NAD	270	252	93.33%	1,599,629,000	1,025,382,300	64.10%
7	Sumatera Utara	570	508	89.12%	2,584,786,000	2,472,461,300	95.65%
8	Sumatera Barat	296	296	100.00%	1,272,676,000	1,129,633,150	88.76%
9	Riau	270	264	97.78%	1,498,515,000	1,305,845,150	87.14%
10	Jambi	303	303	100.00%	1,173,700,000	1,096,894,700	93.46%
11	Sumatera Selatan	387	387	100.00%	1,896,786,000	1,701,631,200	89.71%
12	Lampung	705	705	100.00%	2,717,882,000	2,480,624,600	91.27%
13	Kalimantan Barat	318	317	99.69%	1,435,257,000	1,175,976,241	81.93%
14	Kalimantan Tengah	318	315	99.06%	1,735,985,000	1,405,746,500	80.98%
15	Kalimantan Selatan	300	300	100.00%	1,453,414,000	985,037,450	67.77%
16	Kalimantan Timur	180	180	100.00%	1,326,379,000	923,478,500	69.62%
17	Sulawesi Utara	210	209	99.52%	1,170,388,000	1,147,527,000	98.05%
18	Sulawesi Tengah	285	285	100.00%	1,644,393,000	1,631,341,600	99.21%
19	Sulawesi Selatan	482	478	99.17%	2,271,538,000	2,165,170,500	95.32%
20	Sulawesi Tenggara	270	260	96.30%	1,486,164,000	1,434,246,400	96.51%
21	Maluku	224	192	85.71%	1,661,059,000	1,290,484,700	77.69%
22	Bali	180	180	100.00%	1,080,033,000	1,030,995,000	95.46%
23	NTB	264	254	96.21%	1,161,984,000	1,055,558,600	90.84%
24	NTT	210	186	88.57%	1,519,856,000	1,295,872,148	85.26%
25	Papua	210	180	85.71%	2,705,978,000	2,188,394,150	80.87%
26	Bengkulu	282	282	100.00%	1,574,090,000	1,206,176,700	76.63%
27	Maluku Utara	270	236	87.41%	2,049,476,000	1,785,386,265	87.11%
28	Banten	495	495	100.00%	3,742,908,000	3,436,022,500	91.80%
29	Bangka Belitung	260	260	100.00%	1,451,900,000	1,161,983,600	80.03%
30	Gorontalo	240	180	75.00%	2,242,768,000	2,124,778,275	94.74%
31	Kepulauan Riau	218	217	99.54%	1,610,490,000	1,493,362,900	92.73%
32	Papua Barat	289	208	71.97%	3,613,846,000	2,149,379,000	59.48%
33	Sulawesi Barat	210	188	89.52%	1,354,728,000	955,161,487	70.51%
34	Kalimantan Utara	173	98	56.65%	1,481,196,000	716,394,100	48.37%
	TOTAL	**13,851**	**13,039**	**94.14%**	**72,234,653,000**	**60,234,797,656**	**83.39%**

4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

IKK yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rencana kerja (Renja) tahun 2017 Pusat pelatihan SDM Kesehatan adalah Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi sebanyak 25.000.

Indikator ini terpenuhi dengan pelatihan yang diselenggarakan di BBPK dan Bapelkes sebagai unit pelaksana pelatihan. Selain itu indikator ini juga diperoleh dari pelatihan yang dilaksanakan di Bapelkes seluruh Indonesia melalui dana dekonsentrasi, unit program, rumah sakit dan swasta yang juga melaksanakan pelatihan.

Capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2017

No	UNIT PENYELENGGARA	CAPAIAN	%
1	BBPK/BAPELKES	16,694	38.21%
2	PROV (DANA DEKON)	10,176	23.29%
3	UNIT PROGRAM	5,851	13.39%
4	SWASTA DAN RS	10,970	25.11%
TOTAL		43,691	100.00%

Capaian dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 6

Capaian indikator kinerja kegiatan tahun 2017

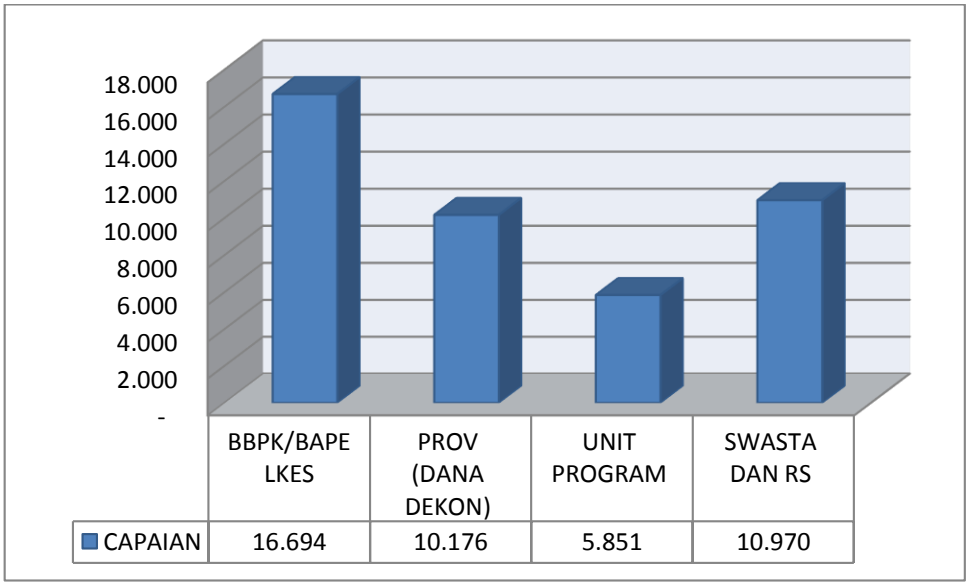

C. Realisasi Anggaran

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Tabel 4

Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA			
JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	0	0	0
BelanjaBarang	29.232.345.000	25.564.207.481	87,45
BelanjaModal	150.000.000	148.555.000	99.04
Total	29.382.345.000	25.712.762.481	87,51

Grafik 7

Realisasi Anggaran Berdasarkan jenis Belanja

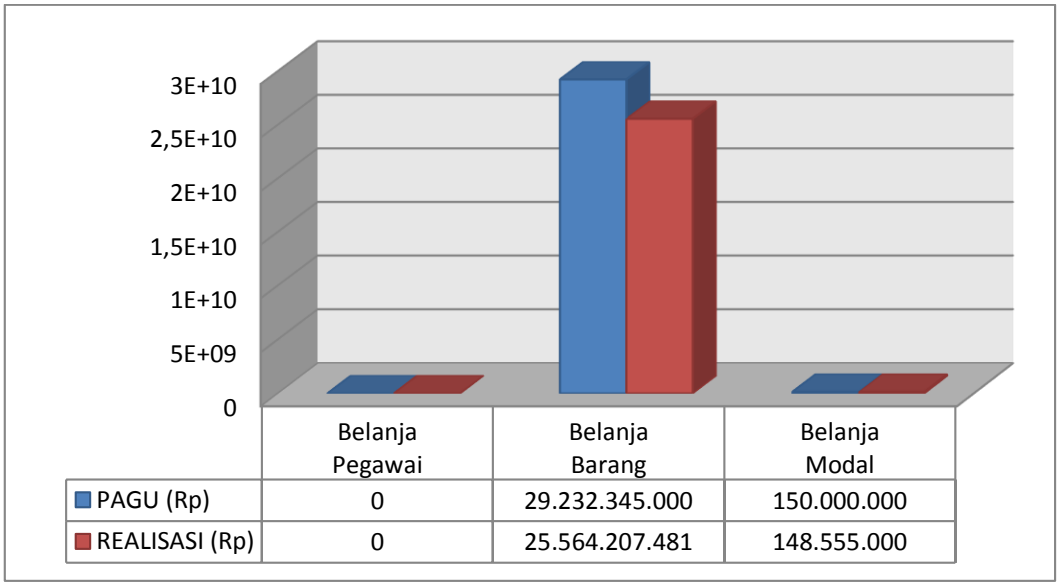

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Tabel 5

Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%
RM	28,827,804,000	25,712,762,481	89.19
PNBP	554,541,000	-	0.00
JUMLAH	29,382,345,000	25,712,762,481	87.51

Grafik 8

Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

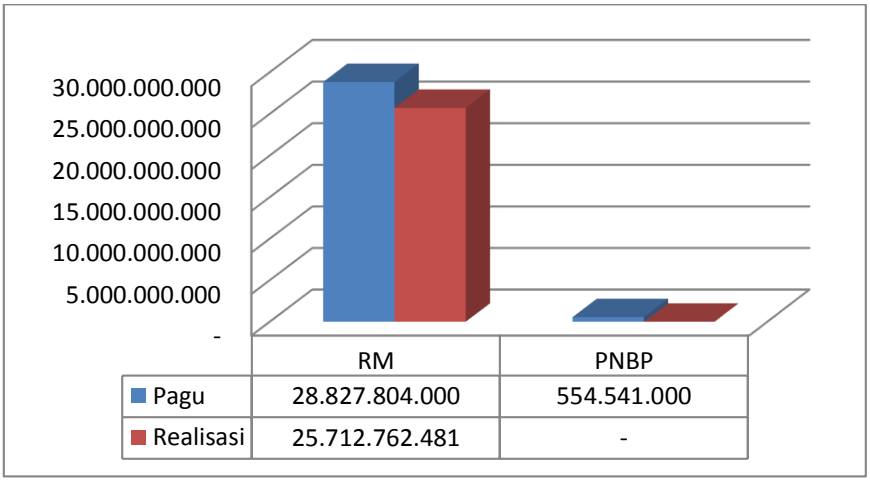

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan

   Realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 87,51 % dapat diuraikan berdasarkan output sebagai berikut :

Tabel 6

Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan

KODE	PROGRAM/KEG/ OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PAGU EFISIENSI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2076	**Pelatihan SDM Kesehatan**	**40.549.442.000**	**29,382,345,000**	**25,712,762,481**	**87.51%**
2076.501	Pelatihan Teknis & Fungsional Bagi SDM Kesehatan	24.288.478.000	16,572,013,000	13,993,016,699	91.30%
2076.951	Layanan Internal	13.910.964.000	10,460,332,000	9,545,272,682	96.63%
2076.994	Layanan Perkantoran	2.350.000.000	2,350,000,000	2,174,473,100	92.85%

Grafik 9

Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan

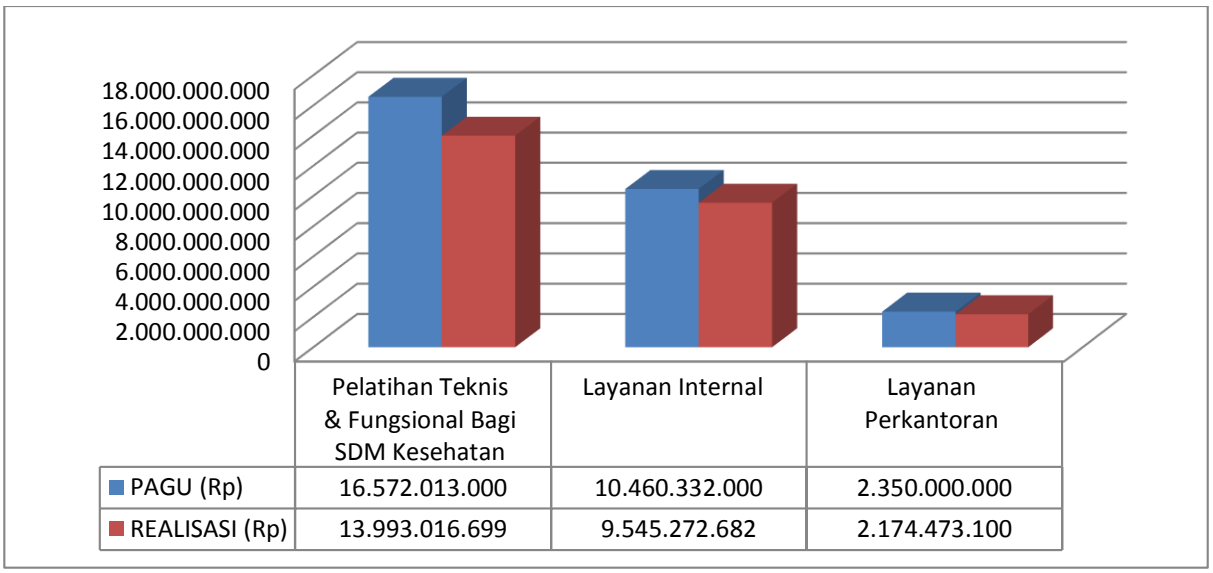

	Pelatihan Teknis & Fungsional Bagi SDM Kesehatan	Layanan Internal	Layanan Perkantoran
PAGU (Rp)	16.572.013.000	10.460.332.000	2.350.000.000
REALISASI (Rp)	13.993.016.699	9.545.272.682	2.174.473.100

4. Penyerapan Anggaran Tahun 2017

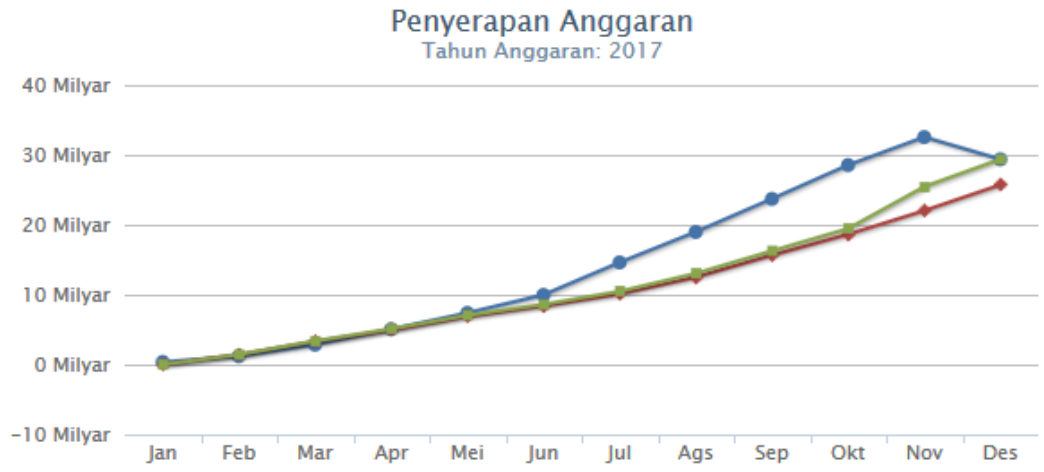

Keterangan:

Rencana Penarikan Dana (awal)
Rencana Penarikan Dana (revisi)
Realisasi Anggaran

5. Pencapaian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Berdasarkan dashboard Aplikasi SMART E-Monev DJA Kementerian Keuangan RI

6. Pencapaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sesuai Aplikasi SMART E-Monev DJA Kementerian Keuangan

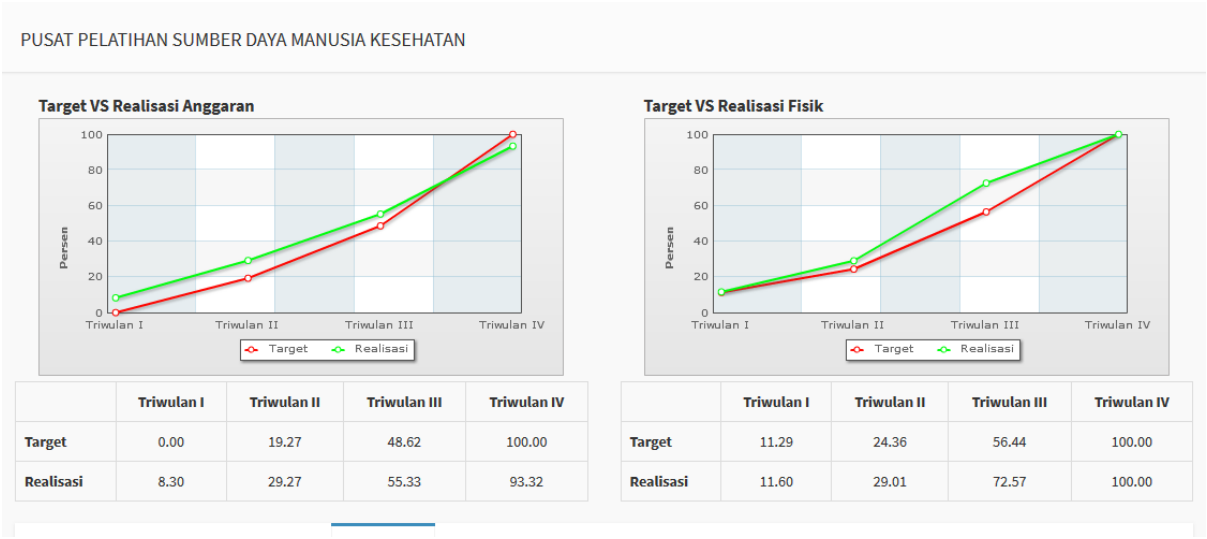

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Target	0.00	19.27	48.62	100.00
Realisasi	8.30	29.27	55.33	93.32

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Target	11.29	24.36	56.44	100.00
Realisasi	11.60	29.01	72.57	100.00

7. Masalah dan Hambatan dalam Realisasi Anggaran

a) Revisi PP terkait PNBP

Sampai dengan akhir tahun 2017, revisi Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2013 tentang tariff dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan kementerian kesehatan belum terbit sehingga tidak ada penerimaan Negara pada Puslat SDM Kesehatan serta tidak adanya realisasi kegiatan bersumber PNBP sebesar Rp. 554.541.000,-

b) Revisi DIPA dan RPD

   Revisi pada DIPa/ RPD yang terjadi 4 (empat) kali mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan serta jadwal pelaksanaan kegiatan

c) Kebijakan Efisiensi

   Kebijakan efisiensi yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan terkait pengurangan anggaran dan pelaksanaan penjadwalan kegiatan

d) Kebijakan perubahan jenis pelatihan

   Kebijakan perubahan jenis pelatihan mengakibatkan perubahan pada volume output pelatihan serta jenis pelatihan yang dilaksanakan di BBPK/ Bapelkes

BAB V
PENUTUP

Laporan Tahunan ini merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2017 yang dalam evaluasinya mengacu pada rencana aksi Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019. Capaian indikator kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2017 mencapai 174,76 % (fisik) dengan realisasi anggaran sebesar 87.51% dengan efisiensi sebesar Rp. 11.167.097.000 atau sekitar 27,54%.

Pusat Pelatihan SDM Kesehatan juga melaksanakan monitoring dan evaluasi pada pelatihan baik yang dilaksanakan daerah dengan dana dekonsentrasi, rumah sakit, unit program dan swasta sebagai upaya dalam menjaga mutu dan kualitas pelatihan yang dilaksanakan agar sesuai dengan standard dan mutu pelatihan yang ditetapkan dalam pedoman akreditasi pelatihan yang telah diajukan sebelumnya dan berhak untuk diterbitkan sertifikat.

Pusat Pelatihan SDM Kesehatan juga melaksanakan koordinasi dengan unit-unit program dalam pelaksanaan pelatihan dengan menerbitkan surat rekomendasi pelaksanaan pelatihan terhadap usulan penyelenggaraan pelatihan.

Selain itu dalam pencapaian indikator Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi, pelatihan bukan hanya dilaksanakan di UPT yaitu BBPK dan Bapelkes, tetapi juga dilaksanakan di 34 Provinsi melalui dana dekonsentrasi, rumah sakit, unit program dan swasta.

Pelaksanaan pelatihan prioritas Kementerian Kesehatan PIS-PK dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia yaitu pelatihan Keluarga Sehat dan pelatihan Manajemen Puskesmas. Selain kedua pelatihan tersebut, di beberapa provinsi juga dilaksanakan pelatihan Tim Penilai jabatan Fungsional Kesehatan dan pelatihan KPP.

sebagai upaya penyelenggaraan pelatihan yang baik juga diterbitkan kurikulum modul pelatihan dan NSPK sebagai bahan ajar dan pedoman pelatihan yang dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi pencapaian kerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2017 baik dari sisi anggaran maupun kinerja.